

## DAFTAR PUSATAKA

### BUKU

- Adrianto, Nico, 2007. *Good-e Governance: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Governance*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Dwiyanto, A. 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2003. *Hukum Anti Monopoli menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gie, The Liang, 2004. *Pengantar Filsafat Ilmu*, Liberty, Yogyakarta.
- Gozali, Djoni Sumardi, *Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2005. *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Handoko, Hani, 1999. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, PT Rafika Aditama, Jakarta.
- Hermansyah, 2008. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2002. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Kelsen, Hans, 2007. *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Terjemahan oleh Somardi. BEE Media Indonesia. Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2006. *Teori Hukum Murni*, Terjemahan oleh Raisul Mutaqien. Nuansa & Nusa Media, Bandung.
- Kristianten, 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Loina, Lalolo Krina P. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta.

- Lubis, Andri Fahmi, dkk., 2009. *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, Creative Media Jakarta.
- Mahsun, Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE, Yogyakarta.
- Makmur, 2011. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Manullang, M. 1977. *Dasar-dasar Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Meyliana, Devi, 2013. *Hukum Persaingan Usaha “Studi Konsep Pembuktian terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha”*, Setara Press, Malang.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mustopa Didjaja, 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kinerja, Lembaga Administrasi Republik Indonesia*.
- Notoatmojo, Soekidjo, 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prasodjo, Tunggul, 2023. *Pelayanan Publik Era Digital*, Literasi Nusantara Abadi, Malang.
- Prayoga, Ayudha D., et.al., 2000. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturinya di Indonesia*, Proyek ELIPS, Jakarta.
- Puspaningrum, Galuh, 2013. *Hukum Persaingan Usaha; Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Rukan, Mustafa Kamal, 2010. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Sidabalok, Janus, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia: dengan Pembahasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siswanto, Arie, 2002. *Hukum Persaingan Usaha*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, 2010. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat di Indonesia*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sutedi, Adrian, 2012. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya (Edisi 2)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tan, Mely G., 1986. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wignjosuebrotto, Soetandyo, *Hukum, Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang.

#### **ARTIKEL ILMIAH/ SKRIPSI/ TESIS/ KARYA ILMIAH LAINNYA**

- Adi, Cosmas Sakti Wijaya, “Analisis Penerapan E-Procurement Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik: Studi Kasus pada Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan Papua Barat”, *Indonesian Treasury Review: Jurnal Pembendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik*, Volume 2, Nomor 2, 2017, hal. 1-16.
- Aflah, Muhammad Nur, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna, “Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah dalam Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, *Jurnal USM Law Review*, Volume 4, Nomor 2, 2021, hal. 631-650.  
<http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279>

- Anggraini, Anna Maria Tri, “Sinergi BUMN dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam Perpektif Persaingan Usaha”, *Mimbar Hukum*, Volume 25, Nomor 3, 2013, hal. 451. <https://doi.org/10.22146/jmh.16072>
- Anindyajati, Titis, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 terhadap Praktek Persekongkolan Tender”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 2, 2018, hal. 369-392.
- Arifardhani, Yoyo, “Kemandirian Badan Usaha Milik Negara: Persinggungan antara Hukum Privat dan Hukum Publik”, *Jurnal Hukum Kenotariatan: Otentik's*, Volume 1, Nomor 1, 2019, hal. 54-72.
- Arifin, Ari Syaiful Rahman, “Analisis Pelaksanaan E-Tendering Jasa Konstruksi berdasarkan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa di Perguruan Tinggi”, *Cived: Journal of Civil Engineering and Vocational Education*, Volume 7, Nomor 1, 2020, hal. 36-43. <https://doi.org/10.24036/cived.v7i1.108428>
- Asmarani, Nur, “Penyalahgunaan Wewenang sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 1, Nomor 4, 2023, hal. 165-171. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10514990>
- Bidari, Ashinta Sekar, Merlin Swantamalo Magna, “Keadilan berdasar Pancasila dalam Merespon Dinamika Transportasi Konvensional dan Online di Indonesia”, *Prosiding Seminar Nasional Hukum Transnendental 2019*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 121-134.
- Cahyani, Endah, “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume 3, Nomor 2, 2022, hal. 79-89. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.15527>

- Candra, Devanno Arya, Waluyo Waluyo, Abdul Kadir Jaelani, “Pengaturan Pelaksanaan Putusan Ajudikasi Non-Litigasi Sengketa Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah”, *Amandemen: Ilmu-Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 2, 2024, hal. 182-195, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.157>
- Damayanti, Suci dan Khoirunissa Sri Yudyaningrum, “Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Berkepastian Hukum”, *Jurnal Hukum Peratun*, Volume 6, Nomor 1, 2023, hal. 109-139.
- Damayunita, Aina, “Analisis Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (*e-Procurement*) di Lembaga Pemerintah Kota Palangkaraya”, *J-MAS: Jurnal Manajemen dan Sains*, Volume 7, Nomor 2, 2022, hal. 1004-1007.
- Danial, Mohammad, Dadang Mashur, “Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa”, *Jurnal Administrasi Pembangunan*, Volume 2, Nomor 3, 2014, hal. 227-360.
- Delmana, Lati Praja, “Pengaruh Penerapan Good Governance dalam E-Purchasing terhadap Pencegahan Korupsi”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, Volume 45, Nomor 1, 2019, hal. 47-62. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v45i1.241>
- Dewi, Riska Cynthia, “Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik”, *Jurnal Media Administrasi*, Volume 7, Nomor 1, 2022, hal. 78-90. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>
- Faisal, Nur Ilmi, Jenny Morasa, Lidia M. Mawikere, “Analisis Sistem Pengadaan Barang dan Jasa (Penunjang Langsung) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pnetaan Ruang Kota Manado”, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*,

Volume 12, Nomor 2, 2017, hal. 1122-1132.  
<https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18613.2017>

Fatri, Lili, Akhirul Insan, Bagus Aulia Ahmad Fahrezi, Candra Hardianto, Natan Sinurat, dan Epin Saepudin, “Urgensi Transparansi Publik pada Kasus kelangkaan Minyak Goreng”, *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 13, Nomor 2, 2022, hal. 114-121.

Fithri, Eka Jumarni, Susi Ardiani, Endah Widyastuti, Rahmad Heru Farista, “Analisis Komparatif Efektifitas dan Efisiensi E-Procurement dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa”, *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, Volume 2, Nomor 1, 2018, hal. 16-24. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3840742>

Gioh, Ronald Richard, “Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Tender Proyek di Sulawesi Utara”, *Lex et Societatis*, Volume 3, Nomor 8, 2015, hal. 99-107. <https://doi.org/10.35796/les.v3i8.9530>

Handayani, Nur, “Pengukuran Kinerja Manajemen dalam Implementasi E-Procurement untuk Mewujudkan Good Government Governance,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Volume 1, Nomor 1, 2022, hal. 59-71. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v1i1.4995>

Hidayat, Ahmad Dzaki, Ihsana El Khuluqo, “Pengaruh Pengawasan Kinerja terhadap Produktivitas Kerja di Biro Umum Badan Narkotika Nasional”, *Jurnal Utilitas*, Volume 3, Nomor 2, 2017, hal. 87-94.

Hidayat, Candra Nur, “Efektivitas Hukum Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik”, *Pamulang Law Review*, Volume 2, Issue 1, 2019, hal. 37-40.

Hidayat, Candra Nur, “Efektivitas Hukum Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik”, *Pamulang Law Review*, Volume 2, Issue 1, 2019, hal. 37-46.

- Hidayat, Rahmat, “Penerapan e-Procurement dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Guna mendukung Ketahanan Tata Pemerintahan Daerah (Studi pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur)”, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Volume 21, Nomor 2, 2015, hal. 118-127.  
<https://doi.org/10.22146/jkn.10155>
- Hutabalian, Maslon, “Tinjauan Hukum tentang Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah”, *Jurnal Hukum Das Sollen*, Volume 8, Nomor 2, 2022, hal. 456-467.
- Hutabarat, Siska Br., Ratna Sari Dewi, “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa”, *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Volume 1, Nomor 3, 2022, hal. 261-268,  
<https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.423>
- Ihsan, Jamil, “Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan oleh Tim Pemantauan Tindak Lanjut di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019-2020”, *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Volume 2, Nomor 2, 2020, hal. 185-194. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i2.389>
- Ikromi, Eka Putri Fauzia, Zahry Vandawati Chumida, Sinar Aju Wulandari, “Persekongkolan Tender Non Sub Kontrak dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”, *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Volume 17, Nomor 2, 2023,  
<http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i2.1976>
- Ilyasi, Ach, “Paradigma Profetik dalam Pelayanan Publik di Indonesia”, *Paradigma Madani*, Volume. 9, Nomor 2, 2022, hal. 83-100.  
<https://doi.org/10.56013/jpm.v9i2.1753>

- Iswandari, Bunga Asoka, “Jaminan Keamanan Data Pribadi Warga Negara dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan berbasis Elektronik (*E-Government*)”, *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Volume 2, Nomor 1, hal. 75-86.
- Jemaru, Salesius dan Samsul Tamher, “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik di Provinsi Papua berdasarkan Perpres Nomor 17 Tahun 2019”, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Volume 4, Nomor 1, 2023, hal. 137-155.
- Jeramu, Salesius dan Samsul Tamher, “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik di Provinsi Papua berdasarkan Perpres Nomor 17 Tahun 2019”, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Volume 4, Nomor 1, 2023, hal. 137-155. <https://doi.org/10.55551/jip.v4i1.57>
- Jubaedah, Edah, Efan Suprastiyo, “Tinjauan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa”, *Fair Value: Jurnal Ilmiah: Akuntansi dan Keuangan*, Volume 4, Special Issue 3, 2022, hal. 1790-1802. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4iSpesial Issue 3.1175>
- Kahfi, Maulana, Kurniawan, Lalu Wira Pria Suhartana, “Persekongkolan Tender (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 405 K/Pdt.Sus-KPPU/2020)”, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Volume 4, Nomor 2, 2023, <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.136>
- Keintjem, Enrico Billy, “Tinjauan Yuridis Praktik Persekongkolan yang Tidak Sehat dalam Tender Proyek Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”, *Lex Administratum*, Volume IV, Nomor 4, 2016, hal. 109.
- Kholby, Affillah Syayyid, Vina Citra Mulyandani, dan Rendra Trisyanto Surya, “Pengaruh Penerapan E-Procurement dan Kompetensi Pegawai terhadap Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa”, *Indonesia Accounting Research Journal*, Volume 3, Nomor 1, 2022, hal. 70-83.



- Kristianto, Ade, “Negosiasi Harga e-Purchasing Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, *Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa*, Volume 1, Nomor 1, 2022, hal. 53-60, <https://doi.org/10.55961/jpbj.v1i1.14>
- Kristiyanto, Eko Noer, “Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 16, Nomor 2, 2016, hal. 231-244. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.231-244>
- Kumar, Narendira dan Srivinasan, “Implementation and Performance Effect on Electronic Procurement and its Ship Management Companies”, *International Journal of Information Engineering and Electronic Business*, Volume 5, Nomor 5, hal. 10.
- Kurniawan, Andi dan Elfrida Ratwati Gultom, “Penerapan Hukum Pembangunan dalam E-Procurement secara Elektronik di Indonesia”, *Ensiklopedia of Journal*, Volume 5, Nomor 4, 2023, 246-253.
- Kurniawati, Estetika Mutiaranisa, Khresna Bayu Sangka, Nur Chayati, An Nurrahmawati, Dian Perwitasari dan Saktiana Rizki Endiramurti, “Accountability of Government Procurement of Goods and Services Through E-Procurement: Approach to Competition, Efficiency, Value for Money, and Integrity”, *Proceedings of the Fifth Annual International Conference on Business and Public Administration (AICoBPA 2022)*, 2023, p. 250-265.
- Kusuma, Tobby Putra, Dava Surya Setyadi, Ivan wisnu Andaru, Ali Roziqin, “Reformasi Birokrasi dalam Aspek Efisiensi dan Transparansi pada Pelayanan Birokrasi Pemerintahan Kota Batu”, *As-Siyasah: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 7, Nomor 1, 2022, hal. 1-9. <http://dx.doi.org/10.31602/as.v7i1.5160>
- Lekipiouw, Sherlock Halmes, Hendrik Salmon, Natanael Lainsamputty, “Model Pengawasan dan Tata Hubungan Kewenangan dalam Upaya Pencegahan

- Tindak Pidana Korupsi Dana Desa”, *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 1, 2022, hal. 14-28, <https://doi.org/10.24269/ls.v6i1.4405>
- Maharani, Septia, Buraida, Febriyanti Maulina, “Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Penyedia Jasa dalam Proses Pengadaan Jasa Konstruksi dengan Sistem Elektronik Kota Banda Aceh”, *Journal of The Civil Engineering Student*, Volume 5, Nomor 1, 2023, hal. 8-14.
- Mahardika, Vita, “Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 16, Nomor 1, 2021, hal. 140-155. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.2636>
- Mahendra, Ketut Gede, Putu Sugi Ardana, “Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak dalam Kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Pemerintah Kabupaten Buleleng”, *Kertha Widya*, Volume 4, Nomor 2, 2016, hal. 56-70. <https://doi.org/10.37637/kw.v4i2.470>
- Mais, Rimi Gusliana, Lini Palindri, “Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mengelola Keuangan Desa”, *Jurnal Akuntansi dan Governance*, Volume 1, Nomor 1, 2020, hal. 57-66, <https://doi.org/10.24853/jago.1.1.57-66>
- Maksum, Umar, M. Makarao, Fauziah Fauziah, “Optimalisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, *Jurnal Hukum Juridictie*, Volume 5, Nomor 2, 2023, hal. 177-190. <https://doi.org/10.34005/jhj.v5i2.138>
- Malinda, Puspa, Paramita Prananingtyas, Ery Agus Priyono, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Peserta Tender dalam Tender dengan Sistem E-Procurement”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, 2017, hal. 1-14. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17432>

- Mantili, Rai, dkk., “Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2016, hal. 118.  
<https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a7>
- Marchia, Anggraeni Rahmawati Dwi, “Penegakan Hukum Pidana atas Kebenaran Informasi Penyedia Jasa dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa”, *Jurnal Cita Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, 2023, hal. 158-173.
- Marchia, Anggraeni Rahmawati Dwi, “Penegakan Hukum Pidana atas Kebenaran Informasi Penyedia Jasa dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa”, *Jurnal Cita Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, 2023, hal.158-173.  
<https://doi.org/10.57100/chi.v1i3.22>
- Marpaung, Lintje Anna, S. Endang Prasetyawati, Baskoro Budihardjo, “Analisis Proses Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa”, 2021.  
<https://doi.org/10.31219/osf.io/gtv4c>
- Mdjij, Neni Vesna, Mulyadi Mulyadi, “Penyelesaian kerugian Daerah Akibat Kelalaian Bendahara”, *Unes Journal of Swara Justisia*, Volume 6, Nomor 3, 2022, hal. 218-228, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i3.264>
- Mokoginta, Rahfan, Herman Karamoy, Hendrik Manossoh, “Analisis Implementasi Kebijakan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Kota Kotamobagu”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, Volume 8, Nomor 2, 2017, hal. 343-354.  
<https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.18662>
- Muksibah, “Larangan Persekongkolan dalam Tender Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 7, 2013, hal. 5.

- Mulyono, Purnomo Edy, “Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Gresik”, *Airlangga Development Journal*, Volume 1, Nomor 1, 2017, hal. 32-42. [10.20473/adj.v1i1.18010](https://doi.org/10.20473/adj.v1i1.18010).
- Munawir, Zaini dan Abdul Lawali Hasibuan, “Faktor Penyebab Tidak Terbukti Secara Hukum Bentuk dan Indikasi Persekongkolan dalam Tender”, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 9, Nomor 2, 2017, hal. 197.
- Murtiningsi, Dwy, “Dampak Hukum Persaingan Usaha Minimarket terhadap Pendapatan Kios Kecil”, *Tadulako Master Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, 2021, hal. 418-446.
- Muskibah dan Lili Naili Hidayah, “Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia”, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 2, 2020, hal. 175-194.
- Nayabarani, Sabrina Dyah, “Membangun Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Peningkatan Peran ICT dalam Mereduksi Korupsi”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 47, Nomor 4, 2023, 10.21143/jhp.vol47.no4.1586. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol47/iss4/5>
- Nursetyo, Gatot, “Analisis Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi (Studi Kasus: Proyek Pemerintah)”, *Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur*, Volume 14, Nomor 18, 2013, Retrieved from <http://ejournal.utp.ac.id/index.php/JTSA/article/view/397>
- Pane, Musa Darwin, “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, *Jurnal Media Hukum*, Volume 24, Nomor 2, 2017, hal. 147-155, <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0090.147-155>
- Pangaribuan, Janson, Safuan, Musa, “Penerapan LPSE (Layanan Pengadaan secara Elektronik) untuk Kemudahan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa”, *Syntax*

*Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 7, Spesial Issue No. 2, 2022, hal. 2623-2633.

Prabowo, Sigit, “Tender Conspiracy in Electronic Procurement of Goods and Services (a study of Case Number 04/KPPU-L/2015)”, *Prophetic Law Review*, Volume 3, No. 1, 2021, pp. 59-77, <https://doi.org/10.20885/PLR.vol3.iss1.art4>

Pratama, Riski Syandri, “Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS LKPP) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, *Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa*, Volume 2, Nomor 1, 2023, hal.1-13. <https://doi.org/10.55961/jpbj.v2i1.32>

Pratama, Satya Surya, “Urgensi Penerapan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, *Journal Komunikasi Hukum*, Volume 8, Nomor 2, 2022, hal. 570-581. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51861>

Pratama, Yuliana, “Kepastian Hukum Lelang Online (*e-Auction*) dalam Ekonomi Digital Tanpa Kehadiran Pejabat Lelang Kelas II”, *Al-Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Volume 21, Nomor 1, 2023, hal. 221-232.

Purba, Herman, Rizaldi Parani, Reni Sara Indrawati, Edo Rinaldo, “The Communication Strategy of the Government Procurement of Goods and Services Agency (LKPP) in Socializing the Use of the e-Catalogue to Promote the Transparency”, *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 9, Nomor 1, 2023, hal. 40-58, <https://doi.org/10.30738/sosio.v9i1.14071>

Putra, Hadian Indrawan, Hasim Purba, Mahmud Siregar, Dedi Harianto, “Asas Keseimbangan dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa”, *Locus: Jurnal*

*Konsep Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 3, 2023, hal. 176-186.  
<https://doi.org/10.56128/jkih.v3i3.297>

Putri, Ovie Sumita, Lovely Dwina Dahen, dan Irfan Ridha, “Tinjauan Yuridis Keabsahan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) dengan Menggunakan Aplikasi Privy dalam Perjanjian Berdasarkan KUHPdata”, *Journal of Sharia and Law*, Volume 2, Nomor 4, 2023, hal. 1157-1182.

Raba’, Mieke Rayu, “Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Melakukan Pemeriksaan terhadap Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik Menurut UU Nomor 15 Tahun 2006”, *Lex Crimen*, Volume 6, Nomor 3, 2017, hal. 152-160.

Rahayu, Risca, Tintin Sri Murtinah, “Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di Unit Layanan Pengadaan Biro Umum, Sekretariat Presiden”, *Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship*, Volume 4, Nomor 2, 2022, hal. 57-67. Retrieved from <https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jbest/article/view/512>

Rajagukguk, Peter, Bambang Haryono, Hardani Hardan, Arief Fadhol, “Sistem Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Pembekalan dan Angkutan Markas Besar TNI Angkatan Darat dengan Metode Penunjukan Langsung”, *Journal Sistem Informasi dan Teknologi*, Volume 2, Nomor 2, 2022, hal. 36-44.  
<https://doi.org/10.56995/sintek.v2i2.43>

Riwukore, Jefirstson Richset, Fellyanus Habaora, Terttiaavini Terttiaavini, “Good Governance dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara (Reviewe)”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Volume 7, Nomor 1, 2022, hal. 1-10.  
<https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.1974>

Rizal, Ahmad, Ridwan Ridwan, Nina Yusnita, “Analisis Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terkait dengan Aset Tetap (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Palu)”, *Katalogis*, Volume 6, Nomor 7, 2018, hal. 46-55.

- Salsabila, Ditiya dan Budi Ispriyarso, “Efektivitas Keabsahan Kontrak Elektronik berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5, Nomor 2, 2023, hal. 1343-1354.
- Saputra, Akmal Rizky, “Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Elektronik pada Pemerintahan Kabupaten Banyumas”, *Seiko: Journal of Management & Business*, Volume 7, Nomor 1, 2024, hal. 1346-1353.  
<https://doi.org/10.37531/sejaman.v7i1.6722>
- Sari, Mela, Rizky Mulyadi, “Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bungo dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik”, *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Volume 3, Nomor 2, 2020, hal. 109-118. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i2.1141>
- Savier, Alem Savier, Teddy Prima Aggriawan, Aldira Mara Ditta Purwanto, “Fenomena Predatory Pricing dalam Persaingan Usaha di E-Commerce (Studi Kasus antara Penetapan Tarif Bawah antara Aplikasi In-Drive dan Gojek)”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Volume 9, Nomor 14, 2023, hal. 64-77. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8170324>
- Segah, Bobby, “Peranan Pengawasan Internal dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, Volume 6, Nomor 2, 2020, hal. 91-97.  
<https://doi.org/10.33084/restorica.v6i2.1813>
- Sholeh, Mohammad, Kesi Widjajanti, Rohmini Indah Lestari, “Penerapan Good Governance pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (*E-Procurement*) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, Volume 16, Nomor 3, 2023, hal. 266-279.  
<http://dx.doi.org/10.26623/jreb.v16i3.6844>
- Siallagan, Rimbun, Bagus Made Agung, Musmuliadi, “Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa secara Elektronik (*E-Procurement*) berdasarkan

- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat”, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Volume 1, Nomor 2, 2022, hal. 112-124. <https://doi.org/10.53640/jimap.v1i2.1122>
- Silalahi, Nova Angelina, “Pembentukan Perangkat Kepatuhan Persaingan Usaha sebagai Strategi untuk Meningkatkan Kepatuhan Persaingan Usaha”, *Jurnal Persaingan Usaha*, Volume 2, Nomor 1, 2022, hal. 30-32. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i-.50>
- Sinaga, Niru Anita, “Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya dengan Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 9, Nomor 2, 2019, hal.1-52. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.352>
- Soniawan, Tabah, M. Naim Musafik, “Manajemen SDM pada Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Blitar (ditinjau dari Aspek Manajemen Sumber Daya Manusia)”, *Revitalisasi: Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 9, Nomor 2, 2020, hal. 212-221. <https://doi.org/10.32503/revitalisasi.v9i2.1361>
- Sudarsono, Sudarsono, “Penerapan Sanksi Daftar Hitam terhadap Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Volume 4, Nomor 3, 2024, hal. 502-511, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1949>
- Suronoto, Faradilla, “Kewenangan Institusi dalam Mewujudkan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik”, *Gorontalo Law Review*, Volume 3, Nomor 2, 2020, hal. 226-250. <https://doi.org/10.32662/golrev.v3i2.994>
- Suryanitya, Reninda, “Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai Lembaga Pengawas Persaingan Usaha yang Independen”, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 2, 2017, hal. 3.



- Susanti, Erna, “Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai Media Pengawasan Masyarakat untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”, *Risalah Hukum*, Volume 5, Nomor 2, 2020, hal. 46-53. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/240>
- Susilayanti, Ni Luh Gede Eka, “Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Menyelesaikan Perkara Persaingan Usaha”, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2014, hal. 4.
- Syafar, Irfan, La Ode Husen, Askari Razak, “Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Data Evaluasi Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, *Lex Generalis Journal*, Volume 3, Nomor 3, 2022, hal. 418-437.
- Taghupia, Venia Clarissa Afriany, “Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Memeriksa Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah”, *Lex et Societatis*, Volume 7, Nomor 5, 2019, hal. 79-87. <https://doi.org/10.35796/les.v7i5.24726>
- Ujianti, Ni Made Puspautari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, “Tinjauan Yuridis Asas Keseimbangan dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, *Kertha Wicaksana*, Volume 12, Nomor 2, 2018, hal. 133-139. <https://doi.org/10.22225/kw.12.2.2018.133-139>
- Wardhani, Irine Ika, Arifa Pratami, Ikbar Pratama, “E-Procurement sebagai Upaya Pencegahan Fraud terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara”, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, Volume 7, Nomor 2, 2021, hal. 126-139, <https://doi.org/10.31289/jab.v7i2.5293>
- Wibawa, Kadek Cahya Susila, “Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Pelaksana dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia”, *Administrative Law & Governance*, Volume 3, Nomor 4, 2020, hal. 661-676. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i4.661 - 676>

- Wibawa, Kadek Cahya Susila, “Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2, Nomor 2, 2019, hal. 218-234, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234>
- Widuri, Endang, “Wajah Undang-Undang Keter (Tutup) Buka Informasi Publik di Indonesia”, *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Volume 2, Nomor 2, 2008, hal. 290-307. <https://doi.org/10.24090/komunika.v2i2.109>
- Wilujeng, Deva Sasti, Octavia Lhaksmi Pramudyastuti, “Evaluasi Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Studi Pembangunan Zona Integritas Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang)”, *Journal of Economic, Management, Accounting, and Technology*, Volume 3, Nomor 2, 2020, hal. 127-135. <https://doi.org/https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1286>
- Wiranata, Rio Agustian dan Mutia Evi Kristhy, “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai Values of Law atas Pelayanan Publik terhadap Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 8, Nomor 1, 2022, hal. 208-218. Open Access at : <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>
- Wulan, Dewi Nawang, Ainul Masruroh, Rusydi Rusydi, “Persekongkolan Tender dalam Persaingan Usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Mimbar Yustisia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Volume 3, Nomor 2, 2019, hal. 105-123. <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/mimbar.v3i2.1959>
- Yatiningrum, Agung, Yayuk Indah Wahyuning Tyas, “Pengaruh Implementasi E-Procurement dan Akuntabilitas terhadap Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo”, *Jesya: Jurnal*

*Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, Volume 5, Nomor 2, 2022, hal. 2153-2165.  
[10.36778/jesy.v5i2.763](https://doi.org/10.36778/jesy.v5i2.763)

Yuniarti, Retno Ayu, “Studi tentang Pelayanan Pencari Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda”, *eJournal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 2, Nomor 1, 2014, hal. 426-435.

Yusni Yusni, “Pengaruh Implementasi E-Procurement dan Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/ Jasa dengan Sistem Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Moderasi”, *IOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, Volume 5, Nomor 2, 2022, hal. 138-148.  
<https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v5i2.219>

Zulfikar, Ahmad Arif, “Kajian Yuridis tentang Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2020, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.82>

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembar Negara Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Nomor 3817

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembar Negara Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Nomor 5038

\_\_\_\_\_, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di bidang Pengadaan Barang/ Jasa Elektronik, Lembar Negara Nomor 31

\_\_\_\_\_, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembar Negara Nomor 63

\_\_\_\_\_, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekonglan Dalam Tender

\_\_\_\_\_, Peraturan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik

\_\_\_\_\_, Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing

\_\_\_\_\_, Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering

#### **SUMBER INTERNET**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, *Laporan Tahun 2022*, hal. 9, diakses dari <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2023/08/Laporan-Tahunan-KPPU-2022.pdf> pada 6 November 2023 Pukul 22.50 WIB.